

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika yang cukup signifikan, yang tercermin dari meningkatnya partisipasi politik, polarisasi ideologis, hingga pergeseran preferensi politik di kalangan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemilihan umum (pemilu) menjadi instrumen vital dalam memastikan keberlangsungan demokrasi. Pemilu bukan hanya rutinitas politik lima tahunan, melainkan mekanisme konstitusional yang memungkinkan rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Urgensi pemilu terletak pada fungsinya sebagai kanal utama partisipasi politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemilu, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, mengevaluasi kinerja pemerintah, serta memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif. Lebih dari itu, pemilu berfungsi sebagai alat sirkulasi kekuasaan yang damai dan legal dalam sistem demokrasi, mencegah praktik otoritarianisme, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan negara. Seperti yang ditegaskan oleh Syafiie (2002), pemilu merupakan proses politik untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam struktur legislatif (DPR, DPD, DPRD) maupun eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota).

Pemilu 2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena dilaksanakan secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif di semua tingkatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan, tetapi juga menuntut kesiapan masyarakat dalam memahami kompleksitas pilihan politik mereka. Dalam konteks inilah, peran kelompok sosial dan kultural menjadi penting, termasuk kontribusi warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin merupakan anggota Nahdlatul Ulama dan memiliki peran penting dalam politik dan sosial Indonesia. Warga Nahdliyin bukan hanya menjadi bagian dari komunitas

keagamaan, tetapi juga aktor politik yang potensial dalam menentukan arah suara dan perolehan kursi pada pemilu.

Identitas sosial merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku dan orientasi politik individu. Tajfel dan Turner (1986) dalam *Social Identity Theory* menyatakan bahwa identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari kesadarannya menjadi anggota kelompok sosial tertentu. Keanggotaan ini membentuk persepsi, sikap, dan perilaku individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pilihan politik. Ketika seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok baik berdasarkan agama, etnis, organisasi, atau tradisi tertentu. Maka preferensi politiknya cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan afiliasi kelompok tersebut.

Relasi antara identitas sosial dan politik semakin relevan dalam konteks demokrasi elektoral, di mana pilihan politik tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas individu, tetapi juga oleh keterikatan sosial dan simbolik terhadap kelompok tertentu. Menurut Huddy (2002) identitas sosial politik terbentuk ketika individu menyatukan afiliasi kelompoknya dengan sikap politik yang serupa, sehingga menciptakan loyalitas dan orientasi politik yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan kata lain, identitas sosial tidak hanya memengaruhi apa yang dipilih, tetapi juga bagaimana individu memahami dunia politik dan peran mereka di dalamnya.

Sebagai bagian dari organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam paling berpengaruh di Indonesia, memiliki jumlah anggota yang besar serta pergerakan yang luas dan mengakar hingga tingkat pedesaan. NU berperan penting dalam mempertahankan Pancasila dan NKRI, dengan fokus utama dalam menyebarkan ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja)* dan memperkuat komitmen kebangsaan. Sebagai organisasi, NU berdiri untuk memperjuangkan Indonesia dengan semangat kebangsaan dan nasionalisme. NU memiliki dua aspek penting yang saling terkait, yakni politik dan sosio-kultural. NU didirikan pada 16 Rajab 1344/31 Januari 1926 oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. NU tidak hanya berperan dalam dakwah *Aswaja*, tetapi juga dalam perjalanan demokrasi Indonesia (Asmawi, 1999). Peran besar Kiai NU dalam politik Indonesia dimulai dengan wadah perjuangan politik ulama tradisional untuk mempertahankan identitas keagamaan di tengah gerakan pembaharuan (Anam, 1999).

NU terlibat dalam politik melalui MIAI (Majelis Islam *A'la* Indonesia), yang pada akhirnya dibubarkan pada 1943 dan digantikan oleh Masyumi, sebuah organisasi yang berkembang menjadi partai politik setelah Indonesia merdeka. NU menjadi bagian penting dari Masyumi, namun perbedaan kepentingan politik menyebabkan NU keluar dan membentuk partai politiknya sendiri. Pada Pemilu 1955, NU memperoleh 45 kursi di parlemen, sebuah pencapaian yang diulang pada Pemilu 1971, berkat solidaritas yang kuat di kalangan santri dan dukungan dari basis tradisionalnya. Jejaring sosial, budaya, dan keagamaan yang dimiliki warga Nahdliyin kerap menjadi kanal efektif dalam distribusi informasi politik maupun mobilisasi dukungan. Martin Van Bruinessen (1996) menyebut NU sebagai fenomena unik yang tidak hanya signifikan di Indonesia, tetapi juga di dunia, terutama karena pendekatan desentralisasi agama yang dijalankannya. Sebagai organisasi yang berpegang pada tradisi *Sunni*, NU cenderung bersikap akomodatif terhadap pemerintah. Meskipun pada periode sebelum 1970-an NU sering mengkritik pemerintah dan menganggapnya oportunistik, akhirnya NU memilih untuk berjalan berdampingan dengan pemerintah, meski tetap dengan kritik yang konstruktif.

Pasca kemerdekaan, khususnya setelah reformasi 1998, dinamika demokrasi Indonesia mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk kembali terlibat dalam politik. Sebagai respons, pada 23 Juli 1998 PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah bagi kader-kader NU. Meskipun didirikan oleh kiai NU, PKB bukanlah partai Islam sempit, melainkan partai nasionalis yang terbuka bagi berbagai kalangan, mencakup agama, ras, dan suku, ras dari seluruh penjuru Indonesia. Relasi antara Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa bersifat aspiratif, kultural, dan historis (Pamungkas, 2012), dengan keterkaitan kultural sebagai aspek yang paling dominan. Keterkaitan ini tercermin dalam peran kiai sebagai tokoh agama yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jati (2012) menyebut kiai memiliki posisi hierarkis sebagai *patron* dalam aspek keagamaan dan sosial budaya. Dalam praktik demokrasi, khususnya pemilu, kiai berfungsi sebagai pengumpul suara (*vote getter*) baik di tingkat lokal maupun nasional (Kusmayadi, 2017). Oleh karena itu, NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan PKB sebagai partai politik memiliki peran yang saling beririsan. Relasi yang kuat antara tokoh NU dan PKB mendorong terbentuknya dan *patronase klientelisme*, terutama di wilayah mayoritas Jawa. Eisenstadt dan Roniger (2011) menjelaskan bahwa *patronase*

terbentuk karena kesamaan visi dan ideologi. Keberadaan NU juga memiliki pengaruh politik yang signifikan terhadap sikap dan pandangan masyarakat *Nahdliyin* (Subiyakto, 2011).

NU sering menjadi perhatian publik dan berbagai kelompok kepentingan terutama menjelang pemilu, baik daerah maupun nasional, legislatif maupun eksekutif. Hal ini terkait dengan besarnya basis massa NU, khususnya warga *Nahdliyin* yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Menurut Alvara Research Center (2017), sekitar 79,8% dari 79,04 juta jiwa yang mengaku berafiliasi dengan NU tinggal di Jawa. Meskipun demikian, NU tidak terlibat langsung dalam politik praktis, karena berdasarkan khittah 1926, NU kembali berfungsi sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan sebagai partai politik. Keputusan ini ditegaskan dalam fatwa pada Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo, yang menegaskan netralitas politik NU. Mukhtamar ke-27 di Situbondo menghasilkan keputusan Nomor 02/MNU-27/1984 yang mengembalikan NU pada khittah 1926 dengan tiga prinsip utama. Pertama, peran ulama *Syuriah* harus lebih dominan dibandingkan *Tanfidiyah*; kedua, NU tidak lagi terikat pada organisasi sosial politik manapun; dan ketiga, NU fokus pada program keagamaan, dakwah, kesejahteraan, dan pendidikan.

NU menegaskan bahwa warga *Nahdliyin* tidak boleh mengatasnamakan organisasi dalam dukung-mendukung politik praktis. Jika terlibat lebih jauh, NU khawatir akan terulang tradisi politik yang buruk, yakni menjadikan NU sebagai alat untuk meraih kekuasaan (Fanani, 2004). Namun, NU memberikan kebebasan bagi setiap *Nahdliyin* untuk berpolitik sesuai hak politik individu. Meskipun NU kembali fokus pada peran sosial keagamaan, politik tetap menjadi perhatian karena beberapa faktor. Pertama, partai politik masih dianggap relevan dalam memperjuangkan kepentingan NU, terutama elite NU, yang mendapatkan keuntungan dalam hubungan politik. Bibit Suprpto (1987) mengidentifikasi keuntungan tersebut dalam tiga bidang: keagamaan, politik, dan sosial budaya, selama 1952-1973. Kedua, politisi tetap memiliki pengaruh besar di tubuh NU. Ketiga, sistem politik yang ada memungkinkan perjuangan kepentingan melalui jalur politik, yang dimanfaatkan NU. Hal ini menjelaskan mengapa pada era reformasi NU kembali terlibat dalam politik, dimulai dengan pendirian PKB yang dipimpin Gus Dur. Banyak aktivis sosial NU terjun ke

politik, baik melalui PKB maupun partai lainnya, untuk meraih kekuasaan dan keuntungan materi.

Dalam konteks penelitian ini, identitas sosial *Nahdliyin* tidak sekadar dipahami sebagai afiliasi keagamaan terhadap Nahdlatul Ulama, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi pengajian, loyalitas terhadap kiai, dan peran pesantren. Oleh karena itu, identitas tersebut tidak hanya merepresentasikan pilihan spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari kebudayaan yang hidup atau yang dalam kajian budaya disebut sebagai objek kultural. Koentjaraningrat (1984) mengategorikan kebudayaan dalam tiga wujud: gagasan, tindakan, dan artefak. Dalam kerangka ini, identitas sosial *Nahdliyin* dapat dimaknai sebagai objek kultural non-material karena ia mencerminkan sistem gagasan dan nilai yang terwujud dalam praktik sosial-keagamaan dan simbol-simbol komunitas *Nahdliyin*, seperti tradisi pengajian, loyalitas terhadap kiai, hingga preferensi terhadap partai politik berbasis NU.

Pileg tahun 2024 memberikan gambaran penting tentang bagaimana keputusan memilih warga *Nahdliyin* terbentuk. Keterlibatan signifikan warga *Nahdliyin* dalam politik praktis terlihat dari partisipasi banyak kader NU dan tokoh-tokoh yang dekat dengan NU dalam tim sukses calon legislatif. Dalam pemilu ini, calon legislatif harus merancang strategi yang matang untuk mempengaruhi perilaku politik masyarakat, khususnya di kalangan warga *Nahdliyin* di pedesaan, agar memperoleh dukungan dan simpati. Pola perilaku politik ini menjadi kunci dalam strategi kemenangan. Masyarakat Kecamatan Rancaekek menunjukkan partisipasinya dalam pemilu legislatif dengan berperan aktif dalam menentukan pilihan mereka, yang tidak lepas dari pengaruh perilaku politik dalam pileg. Kecamatan Rancaekek, yang terletak di Kabupaten Bandung, memiliki peran penting dalam politik lokal karena kepadatan penduduk dan jumlah pemilih yang signifikan. Wilayah ini tidak hanya dikenal dengan dinamika sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi fokus utama dalam setiap pemilihan umum. Dengan keberagaman demografi, Rancaekek menjadi kawasan strategis bagi kandidat politik dan partai, mengingat jumlah pemilih yang besar mempengaruhi hasil pemilihan.

Tabel 1. 1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bandung Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Cileunyi	6	538	64.218	64.860	129.078
2.	Cimendan	9	384	41.748	40.556	82.304
3.	Cilengkrang	6	161	19.649	19.367	39.016
4.	Bojongsong	6	322	39.635	39.531	79.166
5.	Margahayu	5	356	43.566	44.883	88.449
6.	Margasih	6	432	54.748	53.582	108.330
7.	Katapang	7	360	47.882	47.011	94.893
8.	Dayeuhkolot	6	308	38.873	38.911	77.784
9.	Banjaran	11	414	49.838	48.646	98.484
10.	Pameungpeuk	6	252	32.196	31.911	64.107
11.	Pangalengan	13	484	56.171	54.980	111.151
12.	Arjasari	11	323	40.431	38.842	79.273
13.	Cimaung	10	258	33.360	32.586	65.946
14.	Cicalengka	12	403	45.795	44.745	90.540
15.	Nagreg	8	177	21.504	21.067	42.571
16.	Cikancung	9	289	36.180	34.326	70.506
17.	Rancaekek	14	542	67.496	67.870	135.366
18.	Ciparay	14	510	64.863	62.544	127.407
19.	Pacet	13	351	45.117	41.566	86.683
20.	Kertasari	8	231	27.048	25.811	52.859
21.	Baleendah	8	775	96.348	93.682	190.030
22.	Majalaya	11	502	60.749	57.807	118.556
23.	Solokanjeruk	7	267	32.778	31.390	64.168
24.	Paseh	12	401	51.663	48.210	99.873
25.	Ibun	12	293	33.476	31.832	65.308
26.	Soreang	10	335	43.324	42.591	85.915
27.	Pasirjambu	10	299	34.933	33.500	68.433
28.	Ciwidey	7	309	33.051	31.615	64.666
29.	Rancabali	5	182	19.699	18.745	38.444
30.	Cangkuang	7	260	29.609	29.372	58.981
31.	Kutawaringin	11	316	39.249	37.678	76.927
TOTAL		280	11.034	1.345.197	1.310.017	2.655.214

Sumber: jdih.kpu.go.id/jabar/bandung (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Rancaekek tercatat sebagai wilayah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar kedua di Kabupaten Bandung, setelah Kecamatan Baleendah, dengan 135.366 pemilih menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 493 Tahun 2023. Jumlah pemilih yang besar ini menjadikan Rancaekek sebagai kawasan strategis dalam politik lokal, berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan baik di tingkat daerah maupun nasional. Kecamatan Rancaekek dikenal dengan banyak pesantren dan majelis taklim serta memiliki tokoh agama yang sangat dihormati dan berpengaruh terhadap preferensi politik masyarakat. Keterikatan masyarakat pada nilai-nilai keagamaan, terutama melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh NU, menjadikan Rancaekek sebagai wilayah yang representatif untuk mengkaji pengaruh identitas sosial *Nahdliyin* terhadap pilihan politik masyarakat.

Tabel 1. 2 Daftar Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Yang Berada Di Kecamatan Rancaekek

No.	Nama Pesantren	Alamat
1.	Pondok Pesantren Miftahulhidayah Almusri	Jl. Bojong Malati, Rancaekek Kulon, Kec. Rancaekek.
2.	Pondok Pesantren Babussalam	Jl. Buah Dua No.16, Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek.
3.	Pesantren Tahfizh Miftahul Khoir Rancaekek	Jl. Cemp. Raya No.25, Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek.
4.	Pondok Pesantren Miftahul Falah Ash-Shiddiqie	Jl. Neglasari, Rancaekek Kulon, Kec. Rancaekek.
5.	Yayasan Addzimat Dai Indonesia	Jl. Jelegong, Jelegong, Kec. Rancaekek.
6.	Pondok Pesantren Al-Huda	Jl. Cipanas, RT.03/RW.08, Nanjungmekar.
7.	Pondok Pesantren Mardhotillah	Desa Sukamulya, Kec. Rancaekek.
8.	Pondok Pesantren Wasilatussyifa	Jl. Bojongmenje, Cangkuang, Kec. Rancaekek.
9.	Pesantren Sabilunnajah	Jl. Sungai Citarik II Jl. Raya Sapan No.Des, Sukamanah, Kec. Rancaekek.

Tabel 1.2 menunjukkan kehadiran banyak pesantren NU di Kecamatan Rancaekek mencerminkan dominasi kultural Nahdlatul Ulama di wilayah ini. Pesantren, sebagai institusi yang erat kaitannya dengan tradisi NU, memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat sekitar (Jati, 2012). Budaya santri yang mengakar, ditambah dengan nilai-nilai ajaran NU seperti moderasi, toleransi, dan patuh kepada kiai, sangat memengaruhi perilaku sosial dan politik warga. Pesantren di Rancaekek tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat penyebaran ideologi NU, yang memperkuat peran kiai dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat. Fenomena ini tercermin dalam isu "NU milih NU" yang muncul menjelang Pemilu Serentak 2024 baik di tingkat lokal maupun nasional. Kecamatan Rancaekek juga menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, khususnya yang digelar oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU). Kegiatan sosial dan keagamaan yang rutin diadakan oleh masyarakat *Nahdliyin* mencerminkan keterlibatan masyarakat yang tinggi dan dominasi kultural NU di wilayah ini.

Tabel 1. 3 Partisipasi Masyarakat Kecamatan Rancaekek Dalam Kegiatan Sosial-Keagamaan Nahdlatul Ulama

No.	Keterangan
1.	Judul Artikel: “Camat Rancaekek: NU Makin Solid dan Berkembang, Semakin Membanggakan”
	Media: Bale Bandung
	Waktu Publish: 2 Februari 2025
	Waktu Akses: 10 April 2025
	Isi: Camat Rancaekek menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan NU di wilayahnya, yang semakin solid dan berkembang. Beliau menyoroti peran aktif NU dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kehadiran NU dianggap sebagai aset penting dalam menjaga kerukunan dan memperkuat nilai-nilai keislaman di Rancaekek.
2.	Judul Artikel: “Halal Bihalal Keluarga Besar NU Rancaekek: Mempererat <i>Ukhuwah</i> Memperkuat <i>Khidmah</i> ”
	Media: nurancaekek.or.id
	Waktu Publish: Mei 2025
	Waktu Akses: 25 Mei 2025
	Isi: Acara Halal Bihalal ini diselenggarakan oleh Keluarga Besar NU Rancaekek di Masjid Al Huda, Nanjung Mekar. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi warga <i>Nahdliyin</i> Rancaekek untuk mempererat tali silaturahmi, mengokohkan solidaritas keorganisasian, serta memperkuat semangat <i>khidmah</i> dalam menjalankan program-program keumatan dan kebangsaan.

No.	Keterangan
3.	<p>Judul Artikel: “Karang Taruna Raharja Unit RW.13 Bantu Sukseskan Harlah NU Ke-102 dan Harlah PRNU Bojongloa ke-4”</p> <p>Media: nurancaek.or.id</p> <p>Waktu Publish: Februari 2025</p> <p>Waktu Akses: 10 April 2025</p> <p>Isi: Karang Taruna Raharja Unit RW.13 Desa Bojongloa berperan aktif dalam menyukseskan dua acara penting: Harlah NU ke-102 dan Harlah PRNU Bojongloa ke-4. Mereka membantu menyediakan layanan kopi gratis untuk jamaah yang hadir, sebagai bentuk kontribusi sosial dalam rangkaian acara tersebut. Partisipasi ini menunjukkan komitmen Karang Taruna dalam mendukung kegiatan keagamaan dan sosial di tingkat komunitas, serta mempererat hubungan antarwarga melalui kegiatan positif.</p>
4.	<p>Judul Artikel: “Gebyar Ramadhan Fatayat NU Rancaekek : Bersatu, Mandiri, Berprestasi”</p> <p>Media: nurancaek.or.id</p> <p>Waktu Publish: Maret 2025</p> <p>Waktu Akses: 10 April 2025</p> <p>Isi: PAC Fatayat NU Rancaekek menyelenggarakan acara Gebyar Ramadhan dengan tema "Bersatu, Mandiri, Berprestasi" di Masjid Jami Darussalam, Perumahan Pesona Rancaekek Indah, RW 18, Desa Rancaekek Kencana. Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antaranggota Fatayat NU serta memperkuat peran perempuan muda NU dalam kegiatan keagamaan dan sosial di bulan suci Ramadhan.</p>
5.	<p>Judul Artikel: “Nonton Bareng Persib: Menyulam Sportivitas, Budaya, dan Khidmah NU di Rancaekek”</p> <p>Media: nurancaek.or.id</p> <p>Waktu Publish: Mei 2025</p> <p>Waktu Akses: 25 Mei 2025</p> <p>Isi: NU Rancaekek menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Persib Bandung di Lapangan Kasunda sebagai sarana mempererat hubungan dengan warga, khususnya komunitas bobotoh. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan hiburan, tetapi juga sebagai medium syiar dakwah kultural, memperkuat nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, dan khidmah (pengabdian).</p>
6.	<p>Judul Artikel: “Pondok Pesantren Al-Huda Rancaekek Jadi Lokasi Gelaran Yaumul Ijtima PCNU Kabupaten Bandung”</p> <p>Media: NU Online Jabar</p> <p>Waktu Publish: 26 November 2023</p> <p>Waktu Akses: 9 Oktober 2024</p> <p>Isi: Melaporkan bahwa Pondok Pesantren Al-Huda di Rancaekek menjadi tuan rumah acara Yaumul Ijtima yang diadakan oleh PCNU, mempertemukan berbagai elemen masyarakat NU untuk membahas isu-isu terkini.</p>

No.	Keterangan
7.	Judul Artikel: “Di Hadiri KH Said Aqil Siradj, NU Ranting Rancaekek Kencana Gelar Ngaji Kebangsaan”
	Media: Warta Parahyangan
	Waktu Publish: 4 September 2022
	Waktu Akses: 9 Oktober 2024
	Isi: Melaporkan tentang acara ngaji kebangsaan yang dihadiri oleh tokoh nasional KH Said Aqil Siradj di Rancaekek, yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama.

Sumber: Berbagai Media Online di Google

Tabel 1.3 menunjukkan Kecamatan Rancaekek dikenal sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bandung. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan NU menunjukkan tingginya antusiasme dan partisipasi mereka, yang memperkuat kentalnya budaya NU di wilayah ini. Hal ini menjadi perhatian penting bagi calon legislatif (caleg) yang berusaha meraih suara masyarakat *Nahdliyin*, dengan strategi kampanye yang menekankan nilai-nilai keagamaan dan kultural yang dianut oleh komunitas tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Irvan Ansyari dkk. (2019), faktor-faktor seperti jaringan ketokohan, kualitas kader, serta modal sosial dan finansial sangat penting dalam menarik simpati masyarakat. Keberadaan kyai sebagai figur otoritas moral mempertegas bahwa kekuatan kultural NU tidak hanya tercermin dalam aktivitas keagamaan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, pendekatan kampanye yang berbasis pada nilai-nilai agama dan kebudayaan NU bukan hanya untuk meraih suara, tetapi juga untuk mempertahankan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat Rancaekek.

Proses demokrasi pemilihan anggota legislatif secara langsung di Kecamatan Rancaekek telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bandung pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Dominasi partai politik dalam pemilihan umum di Kabupaten Bandung, sangat terlihat dengan kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemenangan ini mencerminkan kekuatan suara Nahdlatul Ulama (NU) yang signifikan di wilayah ini. Sebagai partai yang memiliki basis dukungan kuat dari masyarakat *Nahdliyin*, PKB mampu meraih simpati pemilih dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan kultural yang resonan dengan masyarakat *Nahdliyin*.

Tabel 1. 4 Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung

No	Nama Partai Politik	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7	Jumlah Akhir
1	Partai Kebangkitan Bangsa	59.857	51.380	50.607	54.440	82.236	83.622	65.324	447.466
2	Partai Gerindra	44.761	28.333	33.838	26.424	20.337	35.042	32.972	221.707
3	PDI Perjuangan	18.895	24.618	26.374	17.011	26.411	22.306	19.828	155.433
4	Partai Golkar	45.329	30.352	37.526	62.409	25.790	51.285	64.139	316.830
5	Partai NasDem	35.362	17.889	17.946	12.862	26.379	22.372	23.381	156.191
6	Partai Buruh	1.562	1.659	1.494	1.905	1.586	2.563	2.305	13.074
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1.565	1.757	2.931	8.022	4.811	2.971	5.601	27.658
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	27.407	49.244	40.221	30.699	37.755	36.341	33.220	254.887
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	172	193	279	154	91	902	395	2.186
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	936	1.274	286	294	243	3.175	2.968	9.176
11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	573	643	335	238	401	587	765	3.542
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	32.408	28.465	17.728	9.030	10.473	20.782	41.762	160.648
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.452	1.213	940	1.132	845	943	1.941	9.466
14	Partai Demokrat	30.339	27.943	18.366	24.247	31.017	46.643	27.305	205.860
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6.045	10.608	6.631	4.442	3.697	6.540	5.457	43.420
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.708	6.276	1.827	1.488	1.845	3.515	2.493	19.152
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.498	5.731	5.341	14.152	7.020	17.327	6.932	63.001
18	Partai Ummat	1.360	1.643	1.647	2.291	814	1.584	807	10.145
Jumlah Seluruh Suara Partai Politik Peserta		317.229	289.221	264.317	271.240	281.751	358.499	337.595	2.119.852

Sumber: jdih.kpu.go.id/jabar/id (2023)

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan hasil Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil meraih suara terbanyak dengan 447.466 suara. Kemenangan ini menegaskan bahwa identitas sosial *Nahdliyin* masih menjadi faktor dominan dalam menentukan preferensi politik masyarakat setempat. Sebagai partai yang berafiliasi dengan NU, PKB mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan tradisi yang lekat dengan komunitas *Nahdliyyin*. Dukungan luas yang diperoleh PKB mencerminkan pengaruh kuat identitas *Nahdliyyin* dalam keputusan politik

masyarakat, yang dipengaruhi oleh pendidikan agama, pesantren, pengajian, serta peran Kyai sebagai pemimpin spiritual. Di Kecamatan Rancaekek, hasil pemilihan legislatif menunjukkan fenomena yang berbeda dengan tren di Kabupaten Bandung. Meskipun PKB dikenal memiliki dukungan kuat dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), suara PKB di Rancaekek justru berada di bawah Golkar dan Demokrat, kecuali di tingkat DPRD provinsi. Hal ini menarik, mengingat dominannya keberadaan NU di Rancaekek dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang melibatkan masyarakat *Nahdliyyin*. Dengan pengaruh NU yang signifikan di wilayah ini, seharusnya PKB dapat meraih posisi sebagai pemenang. Sejalan dengan pendapat Pauwels dan Awad (2020) (dalam Wally, 2023), yang menyatakan bahwa faktor-faktor berbasis identitas, seperti perasaan memiliki kelompok dan persepsi terhadap kepentingan kelompok, memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi partai politik, bahkan setelah mempertimbangkan posisi kebijakan dan orientasi ideologis. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengapa di Kecamatan Rancaekek, identitas sosial *Nahdliyyin* tidak menjadi faktor dominan dalam keputusan politik masyarakat, meskipun secara simbolik dan kultural masih sangat kuat.

Untuk memperkuat analisis mengenai kekuatan elektoral PKB di Kabupaten Bandung secara lebih luas, penting untuk melihat tren perolehan kursi DPRD selama tiga periode terakhir. Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah kursi yang diraih partai-partai besar di DPRD Kabupaten Bandung, termasuk PKB, dari periode 2014 hingga 2029:

Tabel 1. 5 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Kabupaten Bandung Dalam Tiga Periode Terakhir

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi Dalam Periode		
		2014-2019	2019-2024	2024-2029
1.	PKB	5	6	12
2.	Golkar	12	11	9
3.	PKS	6	10	7
4.	Demokrat	5	5	7
5.	NasDem	2	5	6
6.	PDI-P	9	7	4
7.	PAN	2	4	4

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi Dalam Periode		
		2014-2019	2019-2024	2024-2029
8.	Gerindra	7	7	6
9.	Hanura	1	0	0
10.	PPP	1	0	0
Jumlah Kursi		50	55	55
Jumlah Partai		10	8	8

Sumber : KPU Kabupaten Bandung

Dari tabel 1.5 terlihat bahwa PKB mengalami lonjakan signifikan dalam hal perolehan kursi, dari 5 kursi (periode 2014–2019), naik menjadi 6 kursi (2019–2024), dan akhirnya melesat menjadi 12 kursi pada periode 2024–2029, menjadikannya partai dengan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Bandung. Kenaikan ini menandai keberhasilan strategi PKB dalam memperluas basis dukungan, baik melalui pendekatan kultural maupun elektoral. Sebaliknya, partai-partai besar lain seperti Golkar, PKS, dan PDI-P justru mengalami penurunan jumlah kursi. Hal ini menegaskan bahwa secara makro, PKB memperoleh kepercayaan elektoral yang semakin kuat di Kabupaten Bandung.

Bahkan, sebagai konsekuensi dari raihan ini, untuk periode 2024–2029, PKB menempatkan kadernya, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung, posisi yang sebelumnya tidak pernah diraih partai ini dalam dua periode sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa secara politik, PKB berhasil menjadi aktor dominan dalam konfigurasi kekuasaan legislatif di tingkat kabupaten, meskipun masih terdapat anomali elektoral di wilayah-wilayah berbasis *Nahdliyin* seperti Rancaekek. Di wilayah ini, perolehan suara PKB justru berada di bawah Partai Golkar dan Partai Demokrat, yang secara ideologis tidak merepresentasikan afiliasi kultural Nahdlatul Ulama. Fakta ini menandai adanya anomali politik, di mana dominasi simbolik dan sosial NU tidak secara otomatis berbanding lurus dengan loyalitas elektoral terhadap partai yang merepresentasikan NU di kancah politik formal.

**Tabel 1. 6 Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Dan Partai Politik Di
Kecamatan Rancaekek Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024**

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara		
		DPR-RI	DPRD Provinsi	DPRD Kab/Kota
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	17.423	17.780	15.833
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.532	12.330	12.050
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.860	4.734	4.279
4.	Partai Golongan Karya	21.259	16.221	23.989
5.	Partai NasDem	4.069	5.560	2.712
6.	Partai Buruh	976	1.403	857
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.109	1.883	5.464
8.	Partai Keadilan Sejahtera	15.686	14.606	14.033
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	116	61	70
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	309	280	141
11.	Partai Garda Republik Indonesia	196	194	102
12.	Partai Amanat Nasional	5.163	7.626	4.019
13.	Partai Bulan Bintang	193	315	270
14.	Partai Demokrat	13.522	14.162	15.942
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3.895	3.154	2.317
16.	PARTAI PERINDO	549	752	625
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.867	2.070	3.459
18.	Partai Ummat	488	847	1.047

Sumber : pemilu2024.kpu.go.id (2024)

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang identik dengan NU, sering kali memperoleh suara lebih rendah dibandingkan partai lain seperti Golkar dan Demokrat. Padahal, dengan pengaruh kultural NU yang dominan, termasuk peran Kyai yang signifikan dalam membimbing masyarakat, PKB seharusnya dapat memperoleh dukungan yang lebih besar. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi preferensi

politik masyarakat, seperti faktor ekonomi, pragmatisme, atau aspek di luar identitas keagamaan.

Kecamatan Rancaekek merupakan salah satu kawasan strategis di Kabupaten Bandung yang mengalami perkembangan pesat, terutama sebagai wilayah industri tekstil dan garmen. Industrialisasi ini telah mendorong arus migrasi dari berbagai daerah, menciptakan masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam. Seperti dijelaskan oleh Mochtar (2014), dinamika sosial di wilayah urban-industrial cenderung membentuk masyarakat yang heterogen dan adaptif terhadap perubahan, termasuk dalam orientasi politik. Keragaman ini tidak hanya menciptakan kompleksitas sosial, tetapi juga mendorong munculnya karakter masyarakat yang cenderung pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya.

Di tengah dinamika tersebut, Rancaekek justru memperlihatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan berbasis NU, seperti pengajian dan tahlilan, yang tersebar luas di berbagai desa. Dengan jumlah pemilih yang besar, keberadaan warga *Nahdliyin* menjadi salah satu elemen sosial yang signifikan secara politik. Namun, pola politik lokal di wilayah ini juga dipengaruhi oleh kecenderungan pragmatisme pemilih yang lebih mementingkan manfaat langsung dibanding keterikatan ideologis atau nilai kultural (Prianto & Yuslaini, 2024).

Dalam situasi seperti ini, menarik untuk mengkaji bagaimana pengaruh identitas sosial *Nahdliyin* terhadap proses pengambilan keputusan memilih, khususnya pada Pemilu Legislatif 2024, mengingat adanya kecenderungan perubahan perilaku pemilih di wilayah tersebut. Besarnya populasi pemilih di Rancaekek pun memberi peluang untuk melakukan analisis statistik yang lebih representatif dan mendalam. Di sisi lain, keterbatasan riset sebelumnya yang belum banyak mengeksplorasi perilaku politik masyarakat *Nahdliyin* di kawasan industri menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi strategi kampanye yang lebih efektif di masa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman politik lokal dan menambah literatur terkait dinamika politik di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti memilih judul penelitian: "Pengaruh Identitas Sosial *Nahdliyin* Sebagai Objek Kultural Terhadap Keputusan Memilih Masyarakat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung".

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa pertanyaan sebagai rumusan penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pengaruh identitas sosial *Nahdliyin* sebagai faktor kultural terhadap keputusan memilih masyarakat pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan Rancaekek?
2. Bagaimana kondisi identitas sosial *Nahdliyin* dan Keputusan Memilih masyarakat pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan Rancaekek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan mengukur seberapa besar pengaruh identitas sosial *Nahdliyin* sebagai objek kultural dalam membentuk preferensi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan Rancaekek.
2. Menganalisis kondisi identitas sosial *Nahdliyin* dan Keputusan Memilih masyarakat pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan Rancaekek.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dan bermanfaat untuk kita semua, berikut manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

- Memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara identitas sosial berbasis agama, khususnya *Nahdliyin*, dan preferensi politik masyarakat di Indonesia. Dengan mengkaji pengaruh identitas sosial *Nahdliyin* terhadap keputusan politik masyarakat di Kecamatan Rancaekek, penelitian ini menyediakan dasar empiris yang kokoh untuk memahami peran identitas sosial-keagamaan dalam dinamika politik Indonesia.

- Mengisi kesenjangan dalam studi sebelumnya yang lebih fokus pada pemilihan presiden atau kepala daerah, dengan menyoroti peran identitas sosial *Nahdliyin* pada tingkat lokal dan legislatif. Dinamika politik di tingkat legislatif sering kali berbeda dengan pemilihan nasional atau eksekutif, sehingga penelitian ini menawarkan perspektif baru yang relevan mengenai preferensi politik di tingkat lokal.
- Memberikan dimensi baru pada teori identitas sosial dengan menguji bagaimana faktor eksternal, seperti ekonomi, pragmatisme, dan strategi kampanye, memengaruhi preferensi politik masyarakat *Nahdliyin*. Temuan ini memperluas pemahaman tentang interaksi antara identitas kelompok dan faktor eksternal, yang dapat mempengaruhi orientasi politik individu, sehingga memperkaya kajian teori identitas sosial dalam konteks politik.

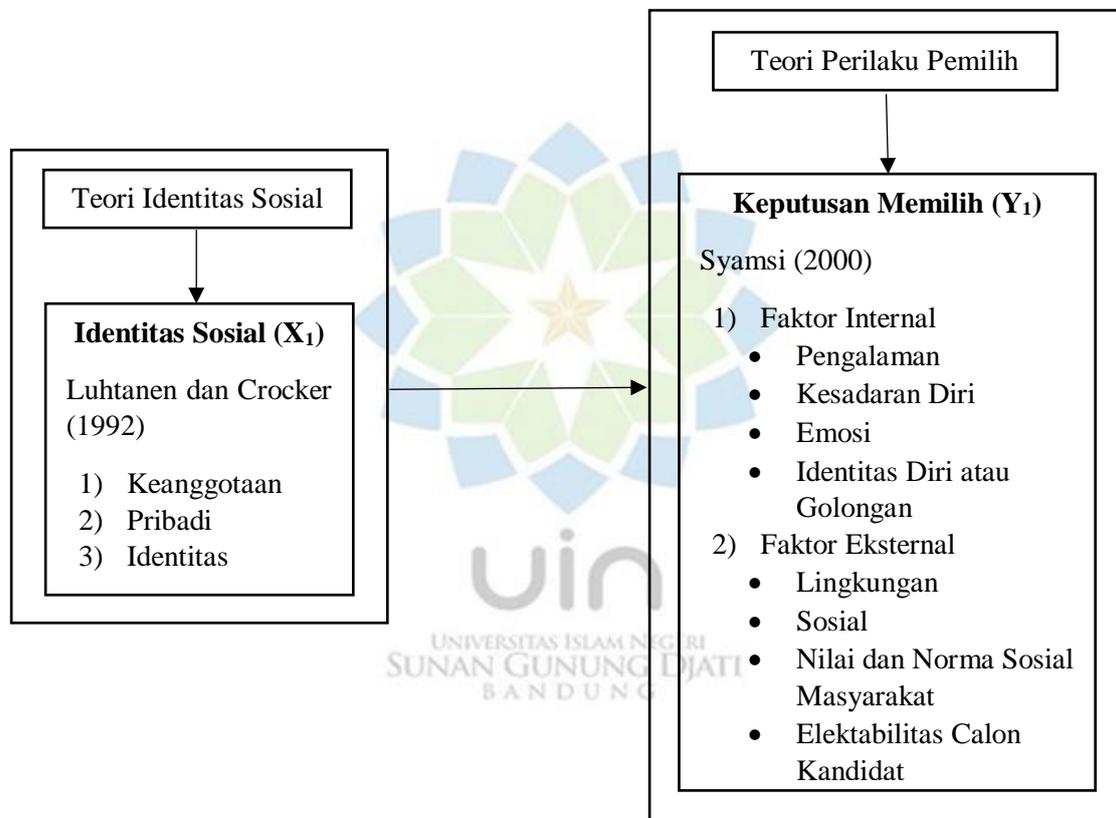
2. Manfaat Praktis

- Memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana identitas dan nilai-nilai kultural NU dapat menjadi dasar dalam merancang strategi kampanye yang lebih efektif bagi kandidat legislatif yang ingin menarik dukungan masyarakat NU. Dengan memahami preferensi politik komunitas NU, kandidat dapat menyesuaikan pendekatan mereka agar lebih relevan dan diterima oleh pemilih yang memiliki ikatan kuat dengan budaya dan nilai-nilai NU..
- Memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk lebih memahami dinamika politik lokal. Dengan memahami pengaruh kultural NU dalam keputusan politik di tingkat lokal, pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah berbasis *Nahdliyin*.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berlandaskan pada teori identitas sosial dan teori perilaku pemilih, yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh identitas sosial *Nahdliyin* terhadap keputusan memilih masyarakat dan menganalisis kondisi identitas sosial *Nahdliyin* dan Keputusan Memilih masyarakat di Kecamatan Rancaekek pada Pemilihan Legislatif tahun 2024. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa identitas sosial yang

terbentuk dari keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku dan preferensi politik individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Burhanuddin Muhtadi (2018) yang mengemukakan bahwa identitas sosial seperti agama dan etnis memiliki peran penting dalam memengaruhi keputusan politik masyarakat. Ia menyebut bahwa agama dan etnis sering kali menjadi bahan bakar utama dalam politik identitas, khususnya menjelang pemilihan umum. Artinya, seseorang cenderung menentukan pilihan politiknya berdasarkan kesamaan identitas kelompok yang diyakini, bukan semata-mata karena visi misi kandidat.



Teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Tajfel dan Turner (1986) menyatakan bahwa individu cenderung mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok tertentu, di mana identitas kelompok tersebut memengaruhi preferensi serta perilaku individu dalam berbagai aspek, termasuk dalam keputusan politik. Dalam konteks ini, masyarakat *Nahdliyin* yang memiliki ikatan kultural dan emosional dengan Nahdlatul Ulama (NU) cenderung mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari komunitas NU. Identifikasi ini dibentuk oleh nilai-nilai sosial dan religius yang dianut oleh NU, seperti moderasi, toleransi, dan nasionalisme, yang pada gilirannya

membentuk preferensi politik masyarakat yang cenderung mendukung kandidat atau partai yang dianggap mewakili nilai-nilai tersebut.

Dalam penelitian ini, identitas sosial *Nahdliyin* diposisikan sebagai variabel bebas (X_1) yang juga merupakan objek kultural. Objek kultural dimaknai sebagai bagian dari unsur kebudayaan non-material yang diwariskan dan dihayati masyarakat, seperti nilai, norma, simbol, dan praktik sosial. Konsep ini merujuk pada pandangan Koentjaraningrat (1984) tentang wujud budaya yang mencakup gagasan, tindakan, dan artefak yang diwariskan dan dihayati oleh suatu komunitas. Dalam konteks ini, identitas sosial *Nahdliyin* mencerminkan sistem nilai, simbol, dan aktivitas sosial-keagamaan yang memiliki makna kultural dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, identitas ke-NU-an warga *Nahdliyin* tidak hanya mencerminkan keanggotaan organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari konstruksi budaya yang berpotensi memengaruhi perilaku politik, termasuk keputusan memilih. Identitas sosial *Nahdliyin* ini dianalisis melalui tiga dimensi utama menurut Luhtanen dan Crocker (1992), yaitu Keanggotaan, Pribadi, dan Identitas.

Di sisi lain, teori perilaku pemilih menjelaskan bahwa keputusan memilih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Keputusan memilih masyarakat (Y_1) dalam penelitian ini dianalisis melalui dua kategori utama menurut Syamsi (2000), yaitu Faktor Internal (meliputi pengalaman politik pribadi, kesadaran diri terhadap peran dalam pemilu, emosi, dan identitas diri atau golongan yang memengaruhi kesetiaan politik) dan Faktor Eksternal (meliputi lingkungan sosial tempat tinggal dan bergaul, pengaruh sosial dari tokoh masyarakat atau keluarga, nilai dan norma sosial masyarakat yang berlaku, dan elektabilitas calon kandidat atau partai yang dinilai memiliki peluang menang). Dalam konteks masyarakat *Nahdliyin*, kehadiran Kyai atau tokoh agama sebagai representasi NU berperan penting dalam membimbing keputusan politik masyarakat melalui ceramah, kegiatan keagamaan, dan pesan moral. Peran Kyai yang dihormati dan dijadikan panutan menjadikannya sebagai agen utama dalam penyebaran nilai-nilai NU yang secara tidak langsung turut memengaruhi preferensi dan perilaku politik warga.

Kecamatan Rancaekek sebagai wilayah dengan basis *Nahdliyin* yang signifikan memiliki keterikatan kuat pada tradisi dan budaya NU yang telah tertanam dalam struktur sosial masyarakat. Namun, preferensi politik masyarakat tidak bersifat

monolitik. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, pragmatisme politik, serta strategi kampanye kandidat legislatif juga memainkan peran penting dalam membentuk pilihan politik.

F. Hipotesis

Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yang nantinya akan diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan data lapangan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₀: Tidak terdapat Pengaruh Identitas Sosial *Nahdliyin* terhadap Keputusan Memilih Masyarakat.

H₁: Terdapat pengaruh Identitas Sosial *Nahdliyin* terhadap Keputusan Memilih Masyarakat.

